Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan

Shohib Muslim, Khrisna Hadiwinata

Dosen Politeknik Negeri Malang

Shohibm27@gmail.com, Nien07@gmail.com

Abstract

The goals to be achieved the authors of this study is to know, understand and analyze the legal protection of prenuptial agreement on the parties to the marriage, linked to haziness rule on the validity of the marriage. Result of research indicates that prenuptial agreement may provide legal protection to the registered marriage because marriage certificate is the authentic evidence that warrants legal certainty to marriage couple. Objectively, prenuptial agreement protects the wealthier parties. The low economic parties may utilize prenuptial agreement as legal protection device by extending the coverage of prenuptial agreement content by enclosing items that may occur in marriage. Marriage is a legal action due to law cause, which also means the unification of wealth obtained during marriage. However, the stipulation of wealth unification is deviated by the making of prenuptial agreement pursuant to Section 29 Law No.1/1974.

Key words: prenuptial agreement, legal protection, marriage

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum dari perjanjian perkawinan terhadap para pihak dalam perkawinan, terkait dengan kekaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan. Perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak. Bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan. Perkawinan merupakan perbuatan hukum mempunyai akibat hukum yaitu persatuan harta yang didapat dalam perkawinan. Ketentuan persatuan harta dapat disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan, seperti dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata kunci: Perjanjian perkawinan, perlindungan hukum, perkawinan

Pendahuluan

Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu, manusia selalu hidup dengan sesamanya. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu masyarakat, yang diharapkan dapat menjaga kesinambungan kehidupan manusia di dunia. Bahkan telah tercantum dalam Al-Quran bahwa Allah telah menjadikan manusia berpasang-pasangan dan diantara manusia terdapat keinginan untuk hidup bersama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. Keinginan untuk hidup bersama ini dapat disalurkan secara benar dengan ikatan perkawinan. Perkawinan selain sebagai perbuatan keagamaan, karena merupakan sunatullah, juga merupakan perbuatan hukum. Perkawinan termasuk dalam bidang hukum keluarga. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28B ayat (1) mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi perkawinan. Akan tetapi para sarjana hukum seperti Asser, Paul Scholten, dan Wiarda mendefinisikan perkawinan sebagai suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal.¹ Ikatan Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-Undang Perkawinan ini memberikan definisi yang lebih jelas dibandingkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengesampingkan unsur agama dalam perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang agama mempunyai peran penting dalam perkawinan yang merupakan perbuatan suci. Perkawinan sebagai

¹ Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang) Hal. 34

perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, manusia lebih kritis dalam persoalan harta kekayaan. Manusia sekarang sudah mempunyai banyak pertimbangan dalam hal melakukan penghitungan terkait keuntungan dan kerugian materi yang akan diperolehnya akibat dilakukannya perkawinan. Perkembangan gerakan emansipasi wanita juga berperan dalam mempengaruhi pola pikir manusia terhadap harta kekayaan. Pada saat ini banyak calon suami istri yang menginginkan perkawinan mereka mempunyai perjanjian perkawinan. Sebagian pihak menganggap perjanjian perkawinan tidak cocok digunakan di Indonesia yang memiliki budaya ketimuran. Akan tetapi perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja. Walaupun tidak dapat dipungkiri pula bahwa kekaburan norma (*vague of norm*) dalam beberapa sisi hukum perkawinan, misalnya Kekaburan peraturan (*vague of norm*) mengenai sahnya perkawinan dan mengenai waktu dibuatnya perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, membuat beberapa pihak yang tidak beriktikad baik untuk menyalahi aturan-aturan dalam hukum perkawinan. Atas dasar alasan tersebut maka penulis tertarik membahas Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan.

Pembahasan

Pembahasan Hukum perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 102 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya sebatas hubungan keperdataan saja. Hal ini berarti bahwa hukum perdata barat memaknai perkawinan dari segi yuridis saja. Artinya perkawinan sudah dianggap sah apabila syarat-syarat perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang terpenuhi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memandang penting adanya unsur keagamaan dalam perkawinan. Konsep perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini berbeda dengan konsep perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan, perkawinan tidak hanya dimaknai dari unsur

yuridis saja melainkan juga dari unsur biologis, sosiologis, dan religius. Unsur perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu: ²

- 1) Ikatan lahir batin (unsur yuridis)
- 2) Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri (unsur biologis)
- 3) Bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (unsur sosiologis)
- 4) Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (unsur Religius)

Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan dalam Pasal 38 yaitu sebagai berikut: "Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas keputusan pengadilan."

Perceraian (*echtscheiding*) merupakan salah satu cara pembubaran perkawinan, jadi bukan satu-satunya penyebab putusnya ikatan perkawinan. Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah:³

- 1) Salah satu pihak berbuat zina (*overspel*)
- 2) Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah
- 3) Salah satu pihak dikenakan pidana penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan
- 4) Percekocokan terus menerus yang tidak mungkin didamaikan (*onheelbaar twespaald*)

Terjadinya perceraian membawa akibat hukum terhadap suami istri yang bercerai, terhadap anak, maupun terhadap harta kekayaan. Terhadap suami istri, adanya perceraian berakibat hapusnya segala akibat perkawinan seperti hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan. Istri mendapatkan kembali kedudukannya sebagai wanita yang tidak kawin. Kekuasaan orang tua juga terhenti dengan adanya perceraian, karena berganti dengan perwalian. Perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa ini ditentukan oleh Pengadilan. Kebersamaan harta dalam perkawinan juga terhenti dengan adanya perceraian. Harta bersama yang ada dalam perkawinan dibagi sebagai harta gono gini antara suami dan istri. Meskipun Undang-undang Perkawinan memberikan pengertian perkawinan merupakan suatu ikatan, akan tetapi perkawinan bukan termasuk dalam bidang hukum perikatan yang diatur dalam buku III

² Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Hal..83

³ Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta. Hal. 115

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut.⁴ Ada dua hal yang penting mengenai perjanjian perkawinan ini. Kesatu, perjanjian ini bukan merupakan sebuah keharusan. Tanpa ada perjanjian perkawinanpun, perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan apabila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untuk menghindarkan terjadinya perselisihan di belakang hari, misalnya mengenai pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama. Kedua, berkaitan dengan isi perjanjian tersebut kendati pada dasarnya dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturanaturan syari'at.⁵ Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai ini dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain". Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bab V pasal 29 disebutkan bahwa:

- 1) "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isisnya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga."

Pengertian perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan telah dijelaskan dimuka. Selain pengertian-pengertian tersebut, ada pengertian lain yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: a. Ta'lik talak b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam" Isi pasal 45 Kompilasi

⁴ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta). Hal. 74

⁵ Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta). Hal. 23

Hukum Islam ini bertentangan dengan penjelasan pasal 29 Undang-undang Perkawinan. Penjelasan pasal 29 Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa “yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak”. Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai perjanjian perkawinan, yang berbunyi: Ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan Ayat (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ayat (3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang perjanjian perkawinan bukan hanya harta bersama yang didapat selama perkawinan berlangsung, tetapi juga termasuk harta bawaan masing-masing suami istri. Perjanjian perkawinan juga bukan hanya untuk melakukan pemisahan harta, tetapi dapat juga menyatukan harta, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak. Adanya perjanjian perkawinan ini tidak menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam perkawinan akan ada permasalahan mengenai harta kekayaan. Harta kekayaan yang dimaksud yaitu berupa harta bersama suami istri maupun harta pribadi masing-masing pihak, termasuk juga harta bawaan. Harta benda perkawinan inilah yang merupakan akibat hukum dari perkawinan. Harta benda perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena harta benda perkawinan sebagai akibat dari perkawinan termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga. Hukum harta benda perkawinan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan, walaupun juga terkait dengan harta atau benda dan hak-hak kebendaan, oleh karena itu tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar mengatakan bahwa “pengaturan harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta atau kekayaan, meskipun diakui bahwa perkawinan akan berakibat pada kedudukan seseorang terhadap

harta kekayaan”.⁶ Konsep harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan konsep dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Konsep harta benda perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persatuan harta, sebagaimana terdapat dalam pasal 119 yang berbunyi “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa mulai saat terjadinya perkawinan berlaku persatuan bulat harta benda, kecuali apabila dilakukan pemisahan harta dengan membuat perjanjian perkawinan. Konsep harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah harta terpisah, sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Apabila berdasarkan pengertian ini, dapat saja terjadi dengan adanya perjanjian perkawinan justru menambah harta kekayaan, sebab harta bawaan yang terpisah dapat diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan. Perbedaan konsep harta perkawinan dari kedua undang-undang ini juga menyebabkan konsep perjanjian perkawinan berbeda dari kedua undang-undang tersebut.

Perjanjian perkawinan antara suami dan istri terlihat sangat ideal bagi pasangan suami istri yang tidak berjanji untuk sehidup semati. Karena itulah secara sosiologis perjanjian perkawinan dirasa kurang pas untuk digunakan di Indonesia yang memiliki budaya ketimuran dan sangat menjunjung tinggi sifat kekeluargaan. Perjanjian perkawinan dianggap mencederai nilai kesucian dari ikatan perkawinan, karena dianggap sangat matrealistis. Perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja. Apabila dipelajari lebih lanjut, pada dasarnya banyak manfaat yang didapat dari perjanjian perkawinan. Hal ini karena dalam perjanjian perkawinan, tidak hanya harta benda yang dapat diatur, melainkan juga hal-hal lain yang terkait dengan pasangan suami istri dalam perkawinan. Perbedaan konsep mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, membuat konsep perjanjian perkawinan berdasarkan kedua undang-undang tersebut juga

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, (Refika Aditama, Bandung). Hal. 90

berbeda. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai ini dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat dipahami bahwa Kitab Undang-undang hukum Perdata memandang perjanjian perkawinan pada umumnya dibuat untuk menyimpangi sistem pengaturan yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Segala harta yang didapat dalam perkawinan, baik didapat oleh suami maupun oleh istri, dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta kekayaan milik bersama. Perjanjian perkawinan dibuat dengan maksud antara lain sebagai pengecualian dari percampuran harta kekayaan tersebut. Pasal 119 telah jelas menyebutkan bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkawinan secara otomatis terjadi persatuan bulat harta kekayaan seketika setelah perkawinan dilangsungkan apabila tidak ditentukan lain, yang kemudian dalam pasal 139 ditentukan bahwa apabila ada penyimpangan maka dibuatlah penyimpangan-penyimpangan itu dalam perjanjian perkawinan.

Dengan demikian secara teoritis konsep perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah memisahkan harta. Secara lebih rinci bunyi pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undangundang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan selanjutnya dalam undang-undang ini” Undang-Undang Perkawinan mempunyai pandangan tersendiri mengenai konsep perjanjian perkawinan. Apabila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata persatuan harta terjadi secara serta merta manakala perkawinan telah dilangsungkan, namun tidak demikian dengan Undang-Undang Perkawinan, karena dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya harta yang bersatu hanyalah harta yang diperoleh selama perkawinan saja. Sedangkan harta bawaan yang diperoleh masing-masing tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak dan tidak masuk menjadi harta bersama. Konsep perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dipahami dari konsep harta kekayaan dalam perkawinan yang dijelaskan pada pasal 35 ayat (2). Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Konsep perjanjian perkawinan sebagaimana dijabarkan sebelumnya tersebut adalah konsep dasar perjanjian perkawinan yang menyangkut hal-hal tentang harta kekayaan. Terkait dengan perluasan terhadap isi perjanjian perkawinan, Undang-Undang perkawinan pada dasarnya tidak mengatur tentang isi perjanjian perkawinan. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isi perjanjian perkawinan sudah ditentukan, misalnya tentang persatuan untung dan rugi, tentang persatuan hasil dan pendapatan,⁷ atau tentang hak istri untuk mengambil sejumlah uang dari harta kekayaan untuk keperluan rumah tangga. Pola pikir masyarakat yang semakin kritis membuat isi perjanjian perkawinan menjadi berkembang.

Pemisahan harta kekayaan bukan satu-satunya alasan perjanjian perkawinan dibuat. Isi perjanjian perkawinan tidak sebatas masalah ekonomi saja. Namun demikian, secara umum perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami dan calon istri untuk mengatur akibat hukum dalam perkawinan mereka. Menurut Mulyadi, “perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum yaitu: a. Timbulnya hubungan antara suami dan istri b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak”⁸ Selain mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, perjanjian perkawinan dapat pula memuat hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah selama perkawinan, maupun apabila suatu saat terjadi putusnya perkawinan. Misalnya tentang monogami, tentang hak pribadi untuk memilih nama keluarga, tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan masing-masing suami istri, tentang para pihak yang tidak boleh melakukan hal-hal kekerasan dalam rumah tangga, tentang tanggung jawab masing-masing terhadap Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “perjanjian, bahwa antara suami istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Airlangga University Press, Surabaya). Hal 23

⁸ Sayyid Sabiq, tanpa tahun, *Fiqh as-Sunnah jilid III*, (Thaha Putra, Semarang). Hal 56

persatuan untung rugi”⁹ Pasal 145 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “dalam hal tidak adanya atau telah dibatasinya kesatuan harta kekayaan, boleh juga ditentukan jumlah uang yang oleh si istri tiap-tiap tahun harus diambil dari harta kekayaan untuk disumbangkan guna membiayai rumah tangga dan pendidikan anak-anak”.

Suami dan istri mempunyai kesepakatan yang bebas namun terbatas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan. Bahkan dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya, sebagaimana terdapat dalam pasal 52 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu”. Tanggung jawab masing-masing suami istri terhadap anak-anak dalam perkawinan juga dapat dijelaskan lebih rinci dalam perjanjian perkawinan, misalnya tentang pendidikan ataupun biaya yang dikeluarkan sehari-hari dalam hal pemeliharaan anak-anak mereka. Undang-undang telah mengatur tentang perjanjian perkawinan dan hal-hal yang terkait dengan perjanjian perkawinan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perjanjian perkawinan banyak disimpangi oleh para pihak. Kekaburan butir-butir hukum perkawinan seringkali membuat manfaat perjanjian perkawinan tidak maksimal. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan kapan waktu dibuatnya perjanjian perkawinan yaitu dalam pasal 147 ayat (1) yang berbunyi: “atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.” Pasal 147 KUH perdata ini menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Pasal 147 KUH Perdata ini tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pasal 149 KUH perdata yang menentukan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah dengan cara apapun setelah perkawinan berlangsung. Namun demikian Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa: “sepanjang perkawinan berlangsung setiap istri berhak mengajukan tuntutan kepada Hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal-hal sebagai berikut:

⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Airlangga Press, Surabaya) Hal 89 dan Soekarno Aburaera, 2013. *Filsafat Hukum*, (Kencana Prenada Media, Jakarta). Hal 13

a. Jika suami karena kelakuannya yang nyata tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapi segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan;

b. Jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si istri dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak istri, akan menjadi kabur atau jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin istri, kekayaan ini dalam keadaan bahaya.”¹⁰

Sebagai gambaran dari pasal 186 KUH Perdata tersebut misalnya seorang calon suami dan calon istri yang melakukan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan, akan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya diketahui bahwa perilaku suami sering membuat kerugian atau akan membuat kerugian bagi istri dan harta kekayaan milik bersama. Contohnya suami suka bermain judi dan menghambur-hamburkan uang harta bersama, hal ini apabila dibiarkan maka akan merugikan pihak istri dan menghabiskan harta bersama. Dengan alasan tersebut salah satu pihak membuat perjanjian perkawinan dan dimasukkan ke Pengadilan untuk dimintakan Penetapannya. Atas pertimbangan nilai kemanfaatan yang diamanatkan Teori tujuan hukum juga menjadi pertimbangan tersendiri. Undang-undang Perkawinan hanya mengatur bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Hal ini berbeda dengan ketentuan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa “waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan lebih luas dengan memberikan dua macam waktu untuk membuat perjanjian perkawinan, yaitu sebelum perkawinan dilangsungkan dan pada saat perkawinan dilangsungkan”.¹¹ Undang-Undang Perkawinan tidak memperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, apabila sebelum atau pada saat perkawinan tidak diadakan perjanjian perkawinan. Setelah perkawinan berlangsung, Undang-undang Perkawinan hanya memberikan kesempatan untuk merubah perjanjian perkawinan

¹⁰ Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata* (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan), Rizkita, Jakarta. Hal 78

¹¹ Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata..*, Hal 79

dengan syarat tertentu, sebagaimana dalam pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan. Ketentuan waktu pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan ini, menurut hemat penulis sedikit kabur. Ketentuan dibuatnya perjanjian perkawinan “pada saat” perkawinan berlangsung sangat tidak jelas. Baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berserta penjelasannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ditemukan penjelasan mengenai apakah perjanjian perkawinan dilakukan pada hari yang sama dengan perkawinan atautkah perjanjian perkawinan dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan perkawinan. Ketentuan “pada saat” tersebut, menurut hemat penulis dirasa sangat tidak pas. Hal ini karena ketentuan “pada saat”, dapat dipahami berarti dua hal yang berbeda dilakukan secara bersamaan pada waktu yang tepat sama persis. Sebagai contoh “pada saat” misalnya perkawinan dilakukan pukul 10.00 WIB dan perjanjian perkawinan juga dibuat pada pukul 10.00 WIB, hal ini sangat tidak mungkin dapat dilakukan. Dalam Agama Islam, misalnya, tidak mungkin calon pengantin mengucapkan ijab qobul sambil menandatangani perjanjian perkawinan. Sedangkan apabila perjanjian perkawinan dibuat pukul 9.50 WIB, kemudian dilakukan perkawinan pukul 10.00 WIB, maka perjanjian perkawinan tersebut tetap dikatakan dibuat sebelum perkawinan, hal ini karena ada jeda waktu antara pembuatan perjanjian perkawinan dan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Apa yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.¹² Pendapat M. Rezfah Omar ini sangat relevan apabila dikaitkan dengan pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Bahkan Sayeed Sabiq berpendapat bahwa “penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan”.¹³ Perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang beriktikad baik dari pihak lain yang tidak beriktikad

¹² Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdat...*, Hal. 137

¹³ A. Damanhuri H. R., 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju) Hal 122

baik. Apabila di lain waktu timbul permasalahan-permasalahan diantara para pihak, perjanjian perkawinan dapat menjadi landasan bagi masing-masing pihak, yaitu suami dan istri, untuk melaksanakan dan memberikan batasbatas hak dan kewajiban diantara mereka. Sesuai dengan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, perjanjian perkawinan harus mempunyai nilai kemanfaatan bagi para pihak dalam perkawinan. Selain sebagai perlindungan hukum bagi para pihak, perjanjian perkawinan juga memberikan manfaat dalam hal terjadi konflik di lembaga pengadilan manakala terjadi perceraian. Sebagaimana telah menjadi rahasia umum bahwa, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang relatif lama dan juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Setidaknya ada dua manfaat yang didapat dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu: 1. Menghemat waktu Proses perceraian biasanya juga di dalamnya terdapat sengketa pembagian harta perkawinan.

Dalam kasus perceraian yang demikian akan ada dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan tentang alasan-alasan perceraian dan pemeriksaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Pemeriksaan terkait harta benda perkawinan inilah yang pada umumnya sangat kompleks, karena tidak hanya tahap pembuktian dipersidangan saja, tetapi juga terkadang memerlukan tahap pemeriksaan setempat. Namun apabila perkawinan tersebut telah terikat perjanjian perkawinan, walaupun dalam proses perceraian timbul sengketa harta benda perkawinan, maka hakim cukup merujuk pada perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Putusan khusus terkait dengan harta benda perkawinan ini dalam bentuk damai. Putusan damai ini adalah putusan akhir yang langsung menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) sejak dibacakan putusan itu sehingga tidak ada upaya hukum lainnya.¹⁴

Menurut A. Damanhuri H. R. "sengketa Perjanjian Perkawinan lebih terarah kepada adanya pengingkaran perjanjian dan atau penyalahgunaan harta benda yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini, bisa jadi pihak yang merasa tidak puas mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, akan tetapi pemeriksaan tetap lebih menghemat waktu apabila dibandingkan dengan perkawinan tanpa perjanjian perkawinan, karena pokok-pokok permasalahan yang diperiksa dalam hal adanya perjanjian perkawinan lebih sederhana dibandingkan apabila dalam sengketa tersebut tidak ada perjanjian perkawinan". Seperti contoh kasus pada Putusan MA No. 1598/K/Pdt/2012 dimana pihak istri mengingkari keabsahan

¹⁴. Damanhuri H. R., 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian...*, Hal 122

perjanjian perkawinan yang telah dibuat dengan dasar keaburan hukum dalam hukum perkawinan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Menghemat biaya Pemeriksaan perkara di pengadilan memiliki banyak tahapan, sehingga memerlukan banyak biaya, paling tidak biaya transportasi dari rumah ke Pengadilan. Belum lagi biaya-biaya lain yang ditimbulkan, seperti pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan setempat, pelaksanaan Sita Jaminan, dan upaya hukum banding atau kasasi. Dampak negatif berperkara di pengadilan akan lebih banyak lagi apabila menyangkut harta benda. Dalam perkawinan yang di dalamnya telah dibuat perjanjian perkawinan, dapat terjadi kemungkinan permasalahan harta benda tidak sampai diproses di pengadilan. Jika memang ada pihak-pihak yang tidak beriktikad baik terhadap harta benda tersebut, perjanjian perkawinan dapat menjadi perlindungan hukum, karena majelis hakim akan merujuk pada perjanjian perkawinan.

Kesimpulan

Perjanjian perkawinan dapat mulai berlaku pada saat perkawinan berlangsung, ketentuan waktu mengenai hal ini harus diartikan pada saat perkawinan sudah dilakukan pencatatan. Sebab dengan dilakukan pencatatan maka perkawinan akan mempunyai bukti otentik yang menjamin kepastian hukum yaitu akta perkawinan. Dengan demikian maka perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak dalam perkawinan. Bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka dapat meminimalkan terjadinya sengketa pada saat perkawinan putus.

Daftar Pustaka

- A. Damanhuri H. R., 2012. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Aburaera, Soekarno. 2013. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Amiur, Nuruddin & Azhari, Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darmabrata, Wahyono. 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta : Rizkita.
- Djamali, R. Abdoel. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elisabeth, Nurhaini Butarbutar. 2012. *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Bandung: Refika Aditama.
- Endang, Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan, Martalena. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 1994. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga Press.
- Sabiq, Sayyid. tanpa tahun, *Fiqh as-Sunnah jilid III*. Semarang: Thaha Putra,.
- Subekti, R. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermedia.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
*Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan*. Kompilasi Hukum Islam.